

41

Analisa Singkat Tentang Kasus Pembunuhan Dukun Santet Dan Isu Teror Ninja Di Banyuwangi Dan Sekitarnya

Oleh : Kol. Pol. Drs. Salikin Moenits

PENDAHULUAN

Pada bulan September 1998 telah terjadi pembunuhan dukun santet dan orang yang dikira dukun santet di Banyuwangi dan sekitarnya (tapal kuda Jatim) secara menyolok dan menjadi perhatian pers/nasional bahkan menjadi isu politik karena setelah peristiwa pembunuhan dukun santet tersebut kemudian

berkembang isu teror Ninja. Peristiwa tersebut menjadi pusat perhatian baik secara nasional maupun internasional dan memunculkan berbagai komentar, reaksi tuduhan bahkan hujatan terhadap aparat keamanan/ABRI dan Pemerintah. Peristiwa tersebut menjadi semakin "mbingungkan" masyarakat karena di blow up oleh media massa, setiap ada pernyataan



pejabat/tokoh dikomentari dan ditanggapi yang justru menambah hangatnya polemik, dilain fihak masyarakat Banyuwangi dan sekitarnya semakin tercekam karena belum mendapatkan pelayanan dibidang keamanan/ perlindungan secara memadai. Akibat situasi tersebut PB NU yang warganya banyak menjadi korban menuntut bahkan "mengultimatum" Pemerintah/ABRI akan mengambil langkah sendiri bilamana masalah tersebut tidak segera ditangani dengan baik dan dituntaskan.

Berbagai tokoh politik dan pengamat sosial memberi tanggapan/penilaian bahwa peristiwa pembantaian dukun santet dan isu teror ninja tidak mungkin peristiwa kriminal murni, tapi merupakan rekayasa politik atau didalangi oleh tokoh politik. Untuk menuntaskan masalah tersebut Menhankam/Pangab bersama PB NU membentuk tim bersama agar kasus/masalah pembunuhan dukun santet dan teror ninja dapat diungkap secara jelas dan dituntaskan.

Tulisan ini mencoba membahas latar belakang terjadi peristiwa pembunuhan dan isu teror ninja tersebut berdasarkan beberapa laporan, berita media masa maupun hasil pengecekan dilapangan, menganalisis dan menyampaikan saran langkah/tindak selanjutnya.

FAKTA DAN DATA

Kabupaten Banyuwangi mempunyai 21



Kabupaten Banyuwangi mempunyai 21 (dua puluh satu) Kecamatan dengan jumlah penduduk \pm 1.600.000 jiwa, mayoritas

beragama Islam (\pm 95,29%) terdiri dari petani, nelayan dan buruh, mayoritas suku Jawa sebagai penduduk asli Banyuwangi dan pendatang berupa suku Madura, Bali, Kawi, Mataram dan pendatang lain.

Suku Using (Osing) sekalipun menganut agama Islam namun masih kuat mempercayai kekuatan magis dan hal-hal yang bersifat gaib berupa sihir, santet, dukun dan dalam hal ini dibedakan antara ilmu hitam (black magic) yang dapat mencelakakan orang (tenung) membuat orang menjadi sakit atau mati dan pengasih (jaran goyang dan sabuk mangir). Sedangkan ilmu putih (white magic) adalah orang yang dapat mengobati penyakit, meramal (pethungan) atau mendatangkan keberuntungan. Kiyai sekalipun dibedakan dengan dukun termasuk golongan "orang putih".

NO.	SATUAN WILAYAH	B U L A N												JUMLAH	KETERANGAN
		JANUARI	PEBUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER		
1.	RES. PASURUAN	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3		
2.	RES. PROBLINGGO	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	4		
3.	RES. LUMAJANG	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1		
4.	RES. SITUBONDO	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1		
5.	RES. BANYUWANGI	1	8	-	-	-	5	14	56	7	-	-	91		
6.	RES. PAMEKASAN	-	-	-	-	-	1	1	5	1	-	-	8		
7.	RES. SAMPANG	1	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	6		
8.	RES. SUMENEP	-	3	3	-	-	-	10	-	-	-	-	18		
9.	RES. KEDIRI	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2		
10.	RESTA MALANG	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
11.	RES. TULUNG AGUNG	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
12.	RES. BOJONEGORO	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1		
	JUMLAH	4	14	4	-	-	3	6	33	64	9	-	137		

Keterangan : Data dari Bagian Intelkom Polda Jatim.

Karena meningkatnya pembunuhan terhadap dukun santet (dan orang yang diduga sebagai dukun santet) di Banyuwangi dan sekitarnya, maka perlu dilakukan penyelidikan.

bukti merupakan kriminal murni, tidak tertutup kemungkinan ada motif yang lain".

Pernyataan Kapolda Jatim bahwa tidak ada

Pernyataan Sekjen NU yang mengultimatum Pemerintah/ABRI dengan memberi batas waktu selama 3 (tiga) bulan kepada aparat keamanan untuk menuntaskan kasus Banyuwangi (pembunuhan dukun santet dan isu Ninja), bila tidak warga NU akan bertindak sendiri untuk menuntaskannya.

Pemberitaan-pemberitaan di media masa (khususnya koran dan TV) yang sangat tendensius dan memblow up peristiwa menyebabkan peristiwa pembunuhan dukun santet menjadi pusat perhatian masyarakat, menjadi komoditi yang laris untuk diberitakan, menarik dan mudah untuk dikomentari, terutama karena era Reformasi yang penuh keterbukaan/transparansi.

Akibat pemberitaan media masa tentang maraknya pembunuhan dukun santet yang kemudian ternyata korbannya bukan hanya dukun santet tetapi termasuk juga guru ngaji (Kiyai), timbul dan berkembang adanya "isu ninja" (orang bertopeng zebo seperti ninja yang akan membunuh dukun santet dan orang dicurigai sebagai dukun santet). Akibat itu tersebut timbul reaksi masyarakat untuk mengamankan diri/lingkungan dengan melaksanakan Pamswakarsa (Siskamling) secara berlebihan ("over defence/protection"), sehingga terjadi pembunuhan terhadap orang yang dikira Ninja (ternyata orang gila) bahkan ke-



Beberapa tim pencari fakta telah turun ke lapangan (Komnas HAM, Depag, DPR, PB NU, Mabes Polri, Mabes ABRI, Pengamat Kriminal/Kepolisian, dan lain-lain) namun hasilnya belum dapat mengungkap secara jelas motif dan otak pelakunya (intelektual dader).

dilengkapi bukti-bukti yang akurat, apalagi yang bernilai yuridis formal.

Atas adanya reaksi dari PB NU (Sekjen NU) yang mengultimatum Pemerintah/ABRI, Menhankam/Pangab dan ketua umum PB NU sepakat untuk membentuk tim bersama Mabes ABRI/Dephankam dan PB NU untuk meneliti dan mengungkap kasus Banyuwangi/Jatim, Jateng dan Jabar. Untuk itu Menhankam/Pangab menerbitkan Sprin No. : Sprin/2305/P/XII/1998 tanggal 1 Desember 1998 (Foto copy Sprin terlampir).

Tim bersama Mabes ABRI/Dephankam dan

beberapa Pamen/Kolonel dari Mabes ABRI/Dephankam. Disepakati untuk diadakan pengecekan ke lapangan, dengan terlebih dahulu diagendakan/materi yang akan dicek dilapangan. Untuk mengakomodasi tuntutan PBNU, materi yang diagendakan untuk dicek dilapangan lebih banyak diambil dari laporan Tim Pencari Fakta PBNU/PWNU Jatim (foto copy terlampir), disepakati ada 8 (delapan) masalah untuk dicek dilapangan (foto copy terlampir) dengan catatan bilamana diperoleh informasi/masukan baru yang perlu dicek dapat dilakukan pengecekan.

Pada tanggal 7 s/d 10 Desember 1998 Team bersama Dephankam/Mabes ABRI dan PBNU telah melakukan penelitian/pengecekan terhadap 8 (delapan) masalah yang telah disepakati bersama, dengan hasil sebagai berikut :

Tentang Radiogram Bupati Banyuwangi yang menurut TPF PB NU menyebabkan meningkatnya pembunuhan terhadap dukun santet di Banyuwangi, versi TPF PB NU ada 2 (dua) instruksi Bupati. Setelah dicek dalam pertemuan pada tanggal 9 Desember 1998 di Mapolres Banyuwangi yang dihadiri Muspida tingkat II Banyuwangi, Ketua PN, Ketua DPRD II, Ketua MUI dan Lanal, Ketua PC NU Banyuwangi dan Team Pencari Fakta PC NU, diperoleh keterangan/fakta:

Menyangkut pendataan dukun santet,

6 Februari 1998 tentang arahan kegiatan Kongres, Musda Seminar menjelang Sidang Umum MPR Maret 1998.

Dalam diskusi terungkap adanya permintaan data dukun santet dilengkapi foto bulan Februari 1998 yang disampaikan oleh Camat Purwohardjo, hal tersebut adalah titipan dari Kapolsek Purwohardjo dalam rangka melengkapi data Intel Dasar Polsek, namun permintaan tersebut s/d saat ini belum terlaksana.

Data dari Kepolisian :

Bulan Januari s/d Agustus 1998 di Kabupaten Banyuwangi telah terjadi 28 kasus pembunuhan dukun santet dengan rincian :

Januari	= 1 kasus
Februari	= 8 kasus
Maret	= -
April	= -
Mei	= -
Juni	= -
Juli	= 5 kasus
Agustus	= 14 kasus

Dari tanggal 1 s/d 16 September 1998 = 23 kasus, sesudah tanggal 17 September s/d 2 Oktober 1998 (sesudah dikeluarkannya Rdg Bupati Banyuwangi) = 45 kasus.

Disamping itu tercatat orang yang diduga dukun santet yang berhasil diselamatkan sebanyak = 739 orang dengan meninggalkan daerah Banyuwangi.

Perkara dan 40 Berkas Perkara sudah dinyatakan lengkap, bahkan sampai dengan 21 November 1998 sudah memperoleh vonis Hakim sebanyak 13 Berkas Perkara.

Dari kajian anatomi kriminal dalam hal ini modus operandi pelaku diketahui bahwa kejahatan dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama, pada waktu malam hari, sebagian rumah calon korban diberi tanda khusus, lampu-lampu pada rumah-rumah penduduk lainnya dipadamkan dan sebagian pelaku mengenakan tutup kepala berupa sarung ataupun zebo (krepus) yang menyerupai "Ninja" sebagaimana yang termuat dalam berbagai media massa dan dari sini keluar isu "Ninja" yang kemudian menjadi berita hangat yang semakin marak.

Dengan maraknya isu ninja tersebut masyarakat kemudian meningkatkan upaya pengamanan Pam Swakarsa melalui Siskamling yang cenderung berlebihan sehingga menimbulkan kekhawatiran masyarakat enggan keluar rumah. Bagi orang-orang gila tidak ter-

(pasien) yang ditarik/dikeluarkan oleh keluarganya dari RS Jiwa antara lain RS Jiwa Lawang di Malang karena tidak mampu membayar biaya berobat. Berdasarkan data kepolisian tercatat kasus penganiayaan/pembunuhan orang gila yang diduga ninja (data dari tanggal 1 s/d 16 Oktober 1998) sebagai berikut:

NO.	WILAYAH	JML. KASUS	KORBAN	ORG. GILA	%
1.	MALANG	52	52	51	
2.	MADURA	9	15	5	
3.	BESUKI	5	8	-	
4.	BOJONEGORO	4	6	3	
5.	SURABAYA	28	27	11	
6.	KEDIRI	15	16	16	
7.	SURABAYA	16			
8.	MADIUN	4	4	2	
Jumlah		133	151	94	62,25%

Tentang adanya teror terhadap tokoh NU/ PKB, berdasarkan keterangan Kapolda Jatim dan Pangdam V/Brawijaya didepan forum pertemuan Muspida dan PBNU/PN NU di Surabaya tanggal 8 Desember 1998 maupun hasil pengecekan di Banyuwangi:

Teror terjadi pada saat maraknya kasus pem-

pimpinan pondok pesantren, dihadapkan dengan keterbatasan personel, maka pemecahan yang diambil adalah melalui peningkatan Pam Swakarsa dan Aparat Keamanan secara aktif membantu dengan meningkatkan pelaksanaan patroli.

Tentang sinyalemen adanya keterlambatan aparat dalam menangani kasus dukun santet dan keterlibatan oknum ABRI serta tokoh politik:

Keterlambatan aparat dalam menangani kasus;

Locus delicti tersebar dan terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan di malam hari.

Terbatasnya jumlah aparat keamanan di daerah (tingkat Polsek/Koramil) dan alat transportasi.

Pelaku bersifat massal disamping masyarakat sendiri yang cenderung melindungi para pelaku karena dianggap berjasa sebagai pahlawan bila membunuh dukun santet.

Petugas dihadapkan pada hambatan-hambatan yang cukup menyulitkan dalam pengumpulan alat bukti (keterangan saksi keterangan ahli, petunjuk, surat-surat dan keterangan ter-sangka).

Timbulnya keberanian massa untuk melawan hukum.

Keterlibatan oknum ABRI;

oknum tersebut (masih terus dialami).

Dugaan keterlibatan Dan Ramil Kota Banyuwangi (Kapten Inf. Agung) yang mengetahui rencana pembunuhan dukun santet, setelah dipertemukan dengan TPF PC NU Banyuwangi ternyata terjadi salah pengertian/salah persepsi, namun masalah ini akan ditindaklanjuti oleh Muspida Banyuwangi bersama TPF PC NU.

Adapun oknum ABRI yang bernama Serda Budi (anggota Marinir) yang diduga sebagai pelatih para preman bertato sekitar bulan Juli 1998 dengan menggunakan tempat latihan di Puslatpur Karang Tekok, setelah dilakukan pengecekan ternyata Serda Budi tidak pernah melatih para preman tersebut. Sebagai tambahan dari hasil pengecekan di Puslatpur Marinir Karang Tekok bahwa latihan bagi anggota non ABRI (Pemuda Pancasila dan FKPI) memang pernah dilakukan yaitu pada bulan Februari 1997 sesuai prosedur ijin/pelaksanaan yang berlaku. Informasi adanya latihan tersebut diperoleh PC NU Banyuwangi dari Sertu Busyaeri/anggota Pusdikmar Surabaya yang diperbantukan di Puslatpur Marinir Karang Tekok untuk menjaga peralatan, saat pengecekan yang bersangkutan berada di Surabaya (mengawasi latihan marinir), masalah ini akan ditindaklanjuti oleh Muspida setempat dengan PC NU Banyuwangi dibantu Dan Lanal Banyuwangi.

NU Jember KH. Yusuf Muhammad (Gus Yus) berjanji akan membantu menjeremihkan masalah ini dan akan bekerja sama dengan Muspida Jember.

Tentang sinyalemen adanya pelaku terorganisir dalam kasus pembunuhan dukun santet.

Adanya kelompok "Empat" (Sdr Sony al. Marson Cs) yang diduga merupakan kelompok pelaku terorganisir dalam kasus pembunuhan dukun santet Banyuwangi.

Untuk mengungkap kelompok masih diperlukan kesaksian H. Djaenuri (anggota PC NU Banyuwangi) sebagai saksi kunci yang sampai saat ini belum dapat untuk dimintai keterangan.

Tentang perbedaan data korban dan pelaku antara temuan TFP PBNU dengan data Pemerintah (Cq ABRI/Polri) diperoleh klarifikasi:

Dari hasil penelitian dilapangan ditemukan perbedaan antara pihak Kepolisian mendasar pada bukti formal, sedangkan pihak PC NU menggunakan pendekatan sosiokultural antara lain tentang keanggotaan dan sebutan Kiyai.

Masalah tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk bersama-sama melakukan pendataan kembali selanjutnya masalah perbedaan data ini dianggap selesai.

Tentang dugaan terlibatnya Bupati, Dandim dan Kapolres.

Dugaan keterlibatan anggota Sat Intelpol Polres Banyuwangi atas nama Dadang/Nanang yang terkait dengan Agus Indrawan (Calo Kir Mobil di LLAJR Banyuwangi) yang didasarkan dari surat kaleng sehingga disepakati untuk sementara dikesampingkan.

Dengan demikian dugaan tentang keterlibatan Bupati, Dandim dan Kapolres dalam kasus pembunuhan dukun santet di Banyuwangi belum didukung adanya bukti yang cukup.

Tentang dugaan adanya wartawan AB berinisial "S" dengan "Mission Impossible" (hasil wawancara dengan saudara Marthin wartawan Surabaya Post) :

Sesuai keterangan Marthin (wartawan Surabaya Post) pada sekitar awal Oktober 1998 pernah bertemu dengan wartawan AB inisial "S" (Syukri) di hotel Weta kamar 303, secara kebetulan hadir juga 2 orang yang diduga oleh Marthin adalah anggota ABRI.

Kedua orang yang diduga ABRI menjelaskan kepada Marthin bahwa keberadaannya di Surabaya dalam rangka urusan tanah dan menjanjikan kepada Marthin untuk pasang iklan di Surabaya Post, Pemasangan iklan tidak jadi sampai saat ini.

Penjelasan Syukri kepada Marthin kedua orang tersebut adalah anggota Grup 4 Cijantung masing-masing bernama Thamrin dan satu orang lagi tidak dikenal namanya menurut Sdr.

Syukri hanya tersenyum saja, apa dari "Kumis"? yang bersangkutan juga tersenyum.

Kasus ini sedang dalam pendalaman oleh Sintel Dam V/Brw dan dit IPP Polda Jatim.

PEMBAHASAN/ANALISIS

Berdasarkan data dan fakta yang diperoleh baik melalui laporan-laporan (Polda Jatim, Mabes ABRI, Depag, Peneliti Polri/Kol. Pol. Drs. Farouk MS) laporan TPF PB NU maupun hasil pengecekan/penelitian lapangan yang dilakukan penulis, disampaikan bahwa :

Kendala penanganan kasus pembunuhan dukun santet di Banyuwangi:

Dampak arus Reformasi.

Pengaruh media massa (koran dan TV) khususnya TV Swasta yang telah menjangkau pedesaan membawa perubahan besar terhadap sikap masyarakat, yang semula masih takut/segan menghadapi aparat menjadi berani, terutama dalam hal unjuk rasa atau melakukan tindakan/kegiatan yang bersifat massal.



Pengaruh media massa (koran dan TV) khususnya TV Swasta yang telah menjangkau pedesaan membawa perubahan

Pengaruh krisis moneter dan dorongan arus Reformasi yang mendorong masyarakat pedesaan untuk berani melakukan tindakan pidana berupa penjarahan secara massal (udang, kayu jati, gudang peternakan dan lain-lain) menyebabkan aparat : "kewalahan" menanganinya. Akibat kewalahannya aparat tersebut (khususnya Polri) timbul kesan dimata masyarakat bahwa kalau kejahatan dilakukan secara massal/bersama-sama, Polri tidak akan/tidak mampu mengambil tindakan secara tegas.

Masalah santet tidak diatur dalam hukum pidana.

Masyarakat menganggap perbuatan santet adalah jahat, sehingga pelakunya (dukun santet) harus dihukum, namun aparat penegak hukum tidak mampu menjeratnya, karena perbuatan santet tidak dapat dibuktikan secara yuridis formal.

Ada kesan dimasyarakat bahwa pembunuhan terhadap dukun santet yang sudah diyakini oleh masyarakat telah menyantet beberapa orang. Polri cenderung "agak melonggarkan" penyidikannya (mungkin untuk "mengambil hati" atau "menentramkan hati" masyarakat). Karena keluarga Polri, bahkan beberapa anggota Polri juga meyakini adanya kemampuan santet tersebut.

Adanya anggapan dan perlakuan warga masyarakat terhadap pelaku yang membunuh

rebek dengan cepat melibatkan pelaku secara massal dengan lokasi TKP di pedesaan dan terjadi malam hari dihadapkan dengan jumlah personel Polsek dan dukungan mobilitas yang serba terbatas menyebabkan penanganan perkara agak terlambat.

Kemampuan profesional anggota Polri yang ada di Polsek masih kurang, apalagi dihadapkan pada kasus yang melibatkan massa dan terjadi pada waktu secara bersamaan pada malam hari dengan kuantitas/jumlah yang cukup besar. (Setahu penulis belum ada pola penanganan/pelatihan penanganan kasus seperti ini) Kasus yang terjadi adalah kasus pembunuhan/penganiayaan dengan massa yang membawa senjata tajam/benda keras terhadap dukun santet yang dibenci masyarakat, disadari atau tidak tentunya ada "tekanan psikologis" anggota Polri yang ada dilapangan (daripada dibilang melindungi/membacking dukun santet lebih baik bersikap lunak agar tidak "mati konyol").

Tidak mustahil pengaruh "motivasi/rangsangan kasus" turut bermain disini, karena disadari atau tidak, diakui atau tidak, "perkara penipuan/penggelapan dan perjudian lebih menarik dibanding dengan perkara pembunuhan/penganiayaan".

Kepemimpinan Kapolres/Kapolsek juga memberi warna terhadap mutu/kualitas penanganan perkara (terhadap Kapolres Banyuwangi, Kapolda Jatim tidak dapat diabaikan).

Marsinah, Udin, perampokan di jalan Tol dan lain-lain), oleh sebab itu manakala anggota Polri telah "mencium" gelagat adanya oknum aparat keamanan yang terlibat, tidak mustahil dibenak petugas tersebut telah timbul kecurigaan/prasangka adanya rekayasa.

Terdeteksi/teramati/terindikasi 6 (enam) oknum ABRI (TNI/AD) berdasarkan hasil penyelidikan Polri dan tersalurnya memo Intel Dit IPP Polda Jatim kepada pihak yang tidak berkompeten. Dilain pihak hasil pemeriksaan Den Pom/Pomdan Brawijaya terhadap oknum ABRI tersebut tidak menemukan bukti keterlibatan oknum tersebut secara psikologis menimbulkan kesan kurang baik antara petugas Polri dilapangan dengan aparat teritorial (Koramil dan Kodim).

Adanya masukan/informasi dari petugas Inteldam V/Brawijaya yang diberikan kepada Polres, namun hasil pemeriksaan/penyelidikan yang dilakukan oleh Polres kurang memuaskan harapan dari sipemberi informasi tersebut menyebabkan kekecewaan pihak Intel Kodam, hal ini tidak mustahil dapat mempengaruhi kelancaran dalam pelaksanaan tugas.

Adanya penilaian dari petugas Intel TNI/AD/BIA bahwa Polres Banyuwangi tetap mempertahankan pendapatnya tentang keterlibatan oknum personil Kodim Banyuwangi, melalui upaya memaksa tahanan yang ada di sel agar

tingkan aspek ekonomi (diminati masyarakat/ laku terjual).

Kurang/tidak diminatinya media massa resmi pemerintah/ABRI dan kurang gencarnya bantahan dan penjelasan oleh Puspen ABRI/Hankam melalui media massa.

Politisasi kasus pembunuhan dukun santet dan isu teror ninja.

Aktor intelektual belum terungkap.

Hasil penyidikan Polri belum dapat mengungkap adanya aktor intelektual (lihat data dan fakta), walaupun indikasi ciri-ciri kemungkinan dikendalikannya pembunuhan dukun santet oleh suatu kelompok/orang tertentu cukup kuat.

Kenyataan hasil penyidikan dilapangan memang benar pelaku diorganisir, diprovokasi, ada pengumpulan dana, dilakukan malam hari secara terencana terhadap rumah korban yang sebagian diberi tanda, namun itu semua dilakukan oleh kelompok masyarakat setempat dipimpin/diorganisir oleh penduduk setempat.

Hasil penyelidikan dan penyidikan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain tidak mempunyai hubungan (tidak ada/tidak terbukti adanya link up).

Kenyataan tersebut seolah tidak dapat diterima oleh publik (khususnya PB NU) bahkan berpendapat tehnik dan modus operandi pelaku pembunuhan dukun santet lebih hebat dari

namun ternyata pelaku juga dari warga NU, hal tersebut kurang dapat diterima oleh pihak NU, tetap mengatakan pastiada faktor intelektualnya.

Kemungkinan ada kaum intelektual NU yang "baru sadar" atau "tersentak" karena bukti yang diperoleh berdasarkan hasil cross check secara terbuka tidak sesuai dengan hasil temuan TPF NU yang mengumpulkan informasi secara sepihak. Namun karena sudah terlanjur menuduh maka sulit bagi mereka mau menerima kenyataan bahwa tuduhannya tersebut tidak terbukti, untuk itu tetap mencari dalih agar NU tetap eksis dalam kaitan untuk memperkuat posisi PKB.

Ada kemungkinan peristiwa tersebut sengaja di besar-besarkan (blow up) oleh pihak NU, untuk selanjutnya NU melakukan manuver untuk menanggulangi (mengatasinya) sehingga masyarakat semakin bersimpati terhadap NU, hal ini akan memperkuat dukungan massa terhadap PKB.

Kemungkinan persaingan mencari pendukung massa antara NU/PKB dengan partai politik yang lain, khususnya Golkar dan PAN.

Tokoh PAN (Amien Rais) pernah ditolak kehadirannya di Kabupaten Pasuruan (Jatim) merupakan indikasi adanya persaingan mencari dukungan massa yang berbasis agama Islam.

Dalam beberapa pembicaraan/diskusi dengan

ngan memojokkan ABRI tentu akan mengimbas ke Golkar.

Selain analisis di atas, dalam berbagai kesempatan penulis memperoleh masukan adanya kurang harmonisan hubungan antara Pangdam V/Brawijaya dan Gubernur KDH I Jatim disatu pihak dengan PW NU Jatim (KH Hasyim Muzadi dan Chaerul Anam) dipihak lain, sedangkan Kapolda Jatim "berusaha menengahi", namun sebagai bagian dari birokrat tetap dinilai masyarakat memihak Pangdam dan Gubernur, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

Keakraban hubungan PW NU Jatim dengan Pangdam V/Brawijaya sebelumnya (Mayjen TNI Djaja S) dan Gubernur Jatim (Mayjen Purn Basofi Sudirman).

Hubungan baik/akrab antara PW NU Jatim dengan Pangdam dan Gubernur sebelumnya, mendorong pencalonan kembali Mayjen Purn Basofi Sudirman untuk menjadi Gubernur periode kedua kalinya (dinominasikan).

Pimpinan ABRI menghendaki adanya pencalonan ulang calon Gubernur Jatim, sehingga DPRD I Jatim merumuskan pencalonan ulang (Basofi tidak ternominasikan lagi) Kapolda Jatim ikut andil dalam pencalonan ulang tersebut, karena perintah Pangab.

Ternyata dalam pemilihan Gubernur KDH I Jatim Basofi tidak terpilih, namun yang terpilih



Kenyataan hasil penyidikan dilapangan memang benar pelaku diorganisir, diprovokasi,

ada pengumpulan dana, dilakukan malam hari secara terencana terhadap rumah korban yang sebagian diberi tanda, namun itu semua dilakukan oleh kelompok masyarakat setempat dipimpin/diorganisir oleh penduduk setempat.

dengan Pandam V/Brawijaya dan Gubernur KDH I Jatim saat ini.

Karena PW NU yang memihak Basofi yang gagal menjadi Gubernur lagi.

Ada kesan (dari sikap) dan masukan dari sumber yang dekat dengan Pangdam V/Brawijaya sekarang (Mayjen TNI Djoko Subroto) karena putra darah dari keturunan Kiyai, sehingga tidak mustahil dinilai Sombong oleh kalangan NU Jatim.

oleh Pangdam dinilai masih kurang valid, sehingga pihak TPF NU tersinggung dan menyatakan bahwa "inikan informasi, yang mendalam dan menyelidiki kebenarannya tentunya aparat keamanan, bukan NU".

Hubungan yang kurang akrab/harmonis tersebut juga terjadi antara Bupati Banyuwangi dengan PC NU setempat.

Sikap Kapolda Jatim yang dinilai "memihak Pemerintah" (Pangdam/Gubernur) oleh masyarakat, khususnya warga NU Jatim.

Klasifikasi Kapolda Jatim bersama Pangdam kepada publik/media massa tentang indikasi keterlibatan oknum ABRI setelah dilakukan pemeriksaan secara mendalam, ternyata tidak terbukti.

Penyidikan oleh Polda Jatim terhadap Pengacara Trimulyo SH yang disangka menghina TNI-AD/Kodam V/Brawijaya.

Hal-hal yang penulis kemukakan diatas menyebabkan semakin sulitnya Polri mendapat dukungan masyarakat, justru masyarakat cenderung menghambat proses penuntasan/penyidikan kasus pembunuhan Dukun Santet/ isu teror Ninja di Banyuwangi.

KESIMPULAN YANG DAPAT DITARIK

Sampai dengan pertengahan Desember 1998

KOLPOL Drs. FAROUK MS, hanya sebagian kecil ada perbedaan pendapat.

Sekalipun tujuan/motif politis belum dapat dibuktikan (terutama aktor intelektualnya) namun peristiwa tersebut telah dimanfaatkan oleh media massa menjadi komoditi berita yang menarik pembaca/pemirsa (mendapatkan oplah dan laris dipasaran) selain itu juga dipolitisasi oleh berbagai pihak baik itu menyudutkan ABRI/Pemerintah (terkait disini Golkar) maupun persaingan mendapatkan massa pendukung (khususnya PKB dan PAN).

Hasil temuan TPF PB NU yang diberikan kepada ABRI sebagian besar dijadikan dasar untuk dicek/diteliti kebenarannya melipti 8 (delapan) masalah. Hasil penelitian/pengecekan dilapangan yang dilakukan oleh tim bersama Dephankam/Mabes ABRI dan PB NU pada tanggal 7 s/d 10 Desember 1998 di Jatim (Banyuwangi, Karang Tekok dan Gumuk Kerang) sebagian besar masih perlu pendalaman lagi karena data yang ada cenderung kurang valid.

Hubungan antara Pangdam V/Brawijaya dan Gubernur KDH I Jatim dengan PW NU Jatim tampaknya kurang harmonis sebaiknya pejabat lama (Pangdam dan Gubernur sebelumnya) cukup akrab/harmonis, hal tersebut diperkirakan berkaitan dengan tidak terpilihnya kembali Mayjen Purn Basofi Sudirman menjadi

counter berita-berita yang validitasnya kurang kuat atas berita yang dapat menimbulkan ketegangan/keresahan dalam masyarakat serta menjalin hubungan agar Pimpinan redaksi/ Penanggung jawab dari media cetak untuk dapat melakukan konfirmasi sumber-sumber berita yang sewaktu-waktu dapat diminta keterangan untuk mendalami dan mengklarifikasi berita-berita yang telah dimuat/diberitakan ataupun untuk bahan penyidikan.

Menghadapi dampak arus reformasi, dimana masyarakat "cenderung berani" mengacukan bahkan melawan petugas, terutama dalam melakukan tindak pidana yang bersifat massal/penjarahan, pengeroyokan, pengrusakan, pengancaman/teror dan lain-lain, perlu dibuat konsepsi/strategi yang lebih bersifat mendasar, baik dibidang pembinaan maupun opsnal (kesan penulis selama ini upaya/langkah yang ditempuh bersifat reaktif/dadakan dibidang opsnal). Selama upaya yang ditempuh hanya mengandalkan aspek Opsnalnya saja, kesan "reaktif" dan "dadakan" sulit di hindari. Kasus-kasus penjarahan, pengrusakan, kerusuhan dan lain-lain yang melibatkan massa yang telah terjadi beberapa waktu yang lalu hingga saat ini menurut pengamatan penulis belum tertangani secara proporsional dan profesional, kita (Polri) "kewalahan" menghadapinya, hal ini terjadi karena kita (Polri) kurang profesional (sebagian orang meng-



Melalui jalur pimpinan ABRI (Pangab dan pejabat teras Mabes ABRI) memerintahkan Pangdam

V/Brawijaya dan menghimbau Gubernur Jatim agar lebih bersikap "low profile" terhadap PW NU Jatim atau melalui pihak ketiga diupayakan untuk "rujuk" kembali.

pokok. Profesional harus didukung dengan peralatan/logistik standard/ideal, termotivasi (motivated), terpelihara baik fisik maupun mental dalam jumlah yang ideal dihadapkan dengan jumlah penduduk. Perlu adanya penentuan standard kualitas (dulu semasa Kapolri Jenderal Kunarto ada "tolok ukur Keberhasilan relatif Satuan", sekarang tidak dipakai lagi) baik perorangan maupun Satuan yang bisa dijadikan dasar untuk melakukan "reward and punishment". Konsepsi tersebut dilaksanakan secara bertahap (Kajang, Kadang, Kadek), terutama dihadapkan dengan kemampuan anggaran negara

ASPEK PEMBINAAN

Personel

Inventarisasi lagi anggota-anggota yang masih potensial untuk ditugaskan dilapangan, menurut pengamatan penulis masih cukup banyak personel "yang dapat didaya gunakan" tetapi karena "hal-hal non teknis" tidak didaya gunakan.

Secara bertahap dan selektif tugas-tugas melayani pejabat (apalagi yang bersifat pribadi) diserahkan kepada PNS saja sedangkan anggota aktif yang memiliki kemampuan dilapangan sebaiknya ditugaskan dilapangan.

Membentuk "unit cadangan/bantuan penyidik" terutama para Pamen/Pama di tingkat Mabes/Polda yang cenderung menganggur atau kurang pekerjaan membantu proses penyidikan (paling tidak memberikan bimbingan atau mengawasi pemeriksaan tersangka/saksi agar efektif dan efisien, sehingga fungsi Kodan lebih menggigit). Bilamana Pamen/Pama yang "idle force" tersebut juga tidak mau/tidak mampu berperan apa-apa disarankan untuk dipercepat pensiunnya, sehingga azas "reward and punishment" dapat ditegakkan (hilangnya kesan "eweh pengaruhna").

Lebih menitik beratkan penilaian kepada anggota yang mampu melaksanakan tugas pokoknya (sebagai Polri), sedangkan keber-

perioritaskan untuk mendukung anggota yang melaksanakan tugas dilapangan.

Memberikan dukungan logistik yang sepadan dengan tuntutan tugas anggota dilapangan.

Anggaran/Srena

Disarankan dilakukan pembahasan ulang besarnya dukungan opsnel dihadapkan situasi lapangan saat ini, terutama menghadapi kasus-kasus yang melibatkan pelaku yang bersifat massal, seperti penjarahan, pengeroyokan dan lain-lain baik untuk petugas preventif maupun repressif, diprioritaskan dukungan opsnel/insentif bagi anggota yang bertugas langsung dilapangan. (ATK, uang transport, uang saku, uang makan dan lain-lain).

ASPEK OPSNAL

fungsi Intel

Mengalakkan kembali peran Intel, khususnya Intelkrim sebagai "mata telinga" untuk mendeteksi perkembangan situasi ditempat tugasnya, sehingga kesan "terdadak", "kecolongan" dan lain-lain dapat dihindari.

Memantapkan profesi Intel sebagai orang yang "mampu berada dilapangan" tanpa diketahui oleh pihak lawan, (menggunakan cover name, cover job dan sebagainya sesuai ketentuan yang berlaku dan kebutuhan dilapangan

berjenjang). Perlakuan terhadap anggota agar disesuaikan dengan prestasinya melaksanakan tugas (dibedakan antara yang malas dan berprestasi dengan yang asal hadir saja).

Fungsi Samapta/Sabhara

Menempatkan kembali fungsi Samaptha/Sabhara (preventif) sebagai "back bone" karena Polri masih menganut "mencegah lebih baik daripada mengobati" sesuai dengan Jukdas Binkamtibmas maupun doktrin yang berlaku, untuk itu langkah-langkah preventif (patroli, penjagaan, pengawasan dan TPTKP) yang berlaku benar-benar diterapkan.

Untuk dapat menerapkan langkah-langkah preventif tersebut sebaiknya kebutuhan dasar agar anggota mempunyai kemampuan sebaiknya diupayakan dicukupi, selain kemampuan profesi perorangannya (ada sindiran yang mengatakan "seperti ayam kampung dilepas mencari makan sendiri, diharapkan telumnya saat bertelur").

Fungsi Reserse

Memotivasi anggota Serse agar lebih tertantang untuk lebih berprestasi (tentukan standar kualitasnya walaupun secara eksak sulit) baik profesionalisme tugasnya maupun sikap mentalnya.

Kendali/wasdal terhadap petugas secara proporsional/tepat, benar.

Memanfaatkan tenaga/personel lain yang mau/mampu membantu fungsi Serse.

Fungsi Bimmas.

Meningkatkan komunikasi dengan masyarakat untuk membentuk sistem kemitraan, untuk itu dukungan standard yang wajar bagi anggota pelaksanaan agar diperhatikan.

Menggiatkan peran Kamswakarsa (Siskamling) dan kegiatan Kamra, Satpam dan lain-lain.

Meningkatkan peran Babinkamtibmas di Polsek-polsek (dukminlog-nya juga harus diperhatikan).

Memotivasi anggota Bimmas yang ada dilapangan akan peran pentingnya dalam sistem operasional tugas Polri (karena anggota lebih memilih tugas di Serse/Lantas, contoh peminat Dikjur Lantas/Serse selalu penuh, sedangkan Dikjur Bimmas kurang).

Fungsi Lantas

Sebagai fungsi yang dinilai "basah" disarankan membantu fungsi yang menghadapi kesulitan dalam mengopsnalkan tugasnya (misalnya membantu transportasi dan sebagainya).

Pada daerah-daerah yang tingkat kerawanan lalu lintasnya kurang, memanfaatkan tenaga